

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020)

Yayang Fitriani¹, R. Budi Hendaris²

^{1,2} Universitas Jenderal Achmad Yani

yayangfitriani0801@gmail.com¹, budihendaris@gmail.com²

Abstrak

Penelitian mempunyai tujuan dalam menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. Penelitian ini yaitu kuantitatif yang populasinya diambil dari Kota/Kabupaten di provinsi Jawa Barat. Menentukan sampel penelitian ini dilaksanakan melalui penggunaan metode Teknik Sampling Jenuh sehingga didapatkan sampel 132 dari 27 Kota/Kabupaten dari Laporan APBD pada website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hasil Penelitian ini secara parsial menemukan bahwa Belanja Daerah tidak dipengaruhi secara positif oleh DAU, sementara Belanja Daerah dipengaruhi secara positif oleh DAK. Sedangkan secara simultan/bersama-sama Belanja Daerah dipengaruhi secara positif oleh DAU dan DAK.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah menjadi komponen pembangunan nasional yang tidak bisa dipisahkan pada prinsipnya otonomi daerah. Daerah yang menjadi daerah otonom memiliki kewajiban dan wewenang untuk melaksanakan kepentingan umum sesuai dengan keikutsertaan masyarakat, prinsip keterbukaan, serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Otonomi daerah merupakan bagian dari demokrasi dan desentralisasi. Hal tersebut sebagai suatu proses yang memberikan tempat untuk munculnya pemerintah daerah yang terpilih dengan demokratis, yang mungkin saja diselenggarakannya pemerintahan berkesinambungan yang memperhatikan kepentingan umum serta mendukung mengambil putusan berdasarkan prinsip tanggung jawab publik.

Kemandirian perlu dilakukan pemerintah daerah karena terdapatnya daerah otonom, termasuk dalam urusan ekonomi. Namun begitu, kompensasi maupun transfer dana tetap diberikan oleh negara berupa dana alokasi khusus dan umum kepada pemerintahan di setiap daerahnya.

Kemampuan finansial setiap daerah untuk membiayai berbagai jenis kegiatan operasional yang berbeda-beda mengakibatkan tidak seimbang sumber keuangan terjadi pada pemerintahan daerah dan pusat, dan antar pemerintahan daerah. Untuk mengatasi sumber keuangan yang tidak seimbang tersebut, maka pemerintahan pusat menyalurkan dana perimbangan ke daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kebijakan otonom daerah pemerintah Indonesia dilaksanakan dengan demokrasi serta terpenuhinya aspek pengelolaan desentralisasi yang baik.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 DAU diperoleh dari APBN yang terbagi atas pengurangan kesenjangan kemampuan finansial setiap daerah dalam memberikan biaya akan keperluan belanja daerah yang berkaitan dengan melaksanakan desentralisasi. Contoh Dana Alokasi Umum (DAU) adalah biaya pegawai, dana pembangunan prasarana dan sebagainya.

DAK digunakan dalam memberikan biaya dalam pembiayaan khusus beberapa pada sektor daerah serta berdasarkan oleh prioritas negara, terutama dalam memberikan biaya keperluan fasilitas layanan standar tertentu dalam mempercepat pembangunan daerah (Derise 2008). Alokasi dana ke daerah dengan pembagian keuntungan menyebabkan terjadinya kesenjangan antar daerah. Peran dana alokasi umum adalah kemampuan dalam membangun keadilan sesuai sumber daya yang tersedia di bidang keuangan dan kebutuhan masing-masing daerah. Berikut beberapa Contoh DAK diantaranya adalah pembiayaan bidang pendidikan, pembiayaan bidang kesehatan, pelayanan umum, dan lain-lain.

Peran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dikembangkan untuk memperbaikinya efisien belanja daerah. Mengingat belum efisiennya Belanja Daerah perlu juga campur tangan pemerintah atas Dana Alokasi Umum (DAU). Salah satu contoh peranannya adalah memberikan ketentuan setidaknya 25% dari DAU yang dialokasikan diperuntukan untuk belanja infrastruktur (Modal). Dari sekian banyak transfer ke daerah ternyata DAK yang paling efektif meningkatkan efisiensi belanja. Di era otonomi daerah ini DAK memang transfer yang penting.

Dalam belanja pemerintah daerah (pemda), pada inefisiensi terdapat dua tren yaitu alokasi dan produktif. Inefisiensi produksi adalah ketika gabungan input, berkaitan dengan ini seperti biaya pemda, yang outputnya tidak dihasilkan secara maksimal. Pengalokasian biaya pemda, dapat dilihat bahwa skala biaya cenderung meningkat

pada kesehatan dan pendidikan, sementara biaya cenderung tetap pada sarana dan prasarana umum, perumahan, serta layanan umum. Pada setiap macam biaya, ditemukan masih belum meningkatnya skala biaya modal, sedangkan biaya pemda didominasi oleh biaya pegawai. Bersamaan dengan transfer ke daerah serta dana desa yang meningkat di setiap tahun, peningkatan ini tidak disertai oleh fasilitas umum yang meningkat dengan signifikan.

Pada APBD Perubahan kapasitas belanja Jawa Barat yang ditentukan sebanyak Rp39,42 triliun. Belanja ini menurun sebanyak Rp5,22 triliun dibandingkan perencanaan awal yakni Rp44,62 triliun. Berkurangnya belanja daerah Rp5,22 triliun yang awalnya Rp44,62 triliun berubah jadi Rp39,42 triliun. Pada APBD perubahan turunnya kapasitas belanja diakibatkan covid 19. Penghasilan daerah menurun karena pandemi menyebabkan belanja APBD harus menyesuaikan susunan APBD perubahan yang keadaannya dirasa memberatkan, karena turunnya penghasilan daerah secara signifikan yang dampak rasionalnya yaitu menyesuaikan pada beragam belanja daerah. Ada proyeksi belanja daerah yang terpaksa ditunda akibat adanya pandemi covid 19. (www.jabar.antaranews.com,2021).

Di Jawa Timur merealisasikan biaya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggap terlalu rendah, ditengah pengupayaan kerja sama dalam membantu menumbuhkan perekonomian serta bahaya stagflasi. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 50% angka tersebut dianggap belum mendekati sasaran dan terlalu rendah. Padahal APBN mempunyai dana transfer yang 54% nya sudah tersalurkan. Namun terlalu rendahnya realisasi serapan anggaran yang dimiliki. Belanja modal menjadi bentuk belanja yang terbilang masih terlalu rendah pada beragam bagian serapan anggaran. Pada perencanaan belanja daerah di provinsi Jawa Barat yang jadi bagian yang tinggi urutan tiga yaitu belanja modal. Oleh karenanya pemerintah mendorong pemda agar menentukan langkah strategis dan terus memperhatikan pelaksanaan kegiatan terkait realisasi APBD sehingga alokasi anggaran dapat terserap dengan baik. Sehingga membantu upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi agar para kepala daerah lebih maksimal dalam menyerap anggaran. Apalagi dana transfer pemerintah pusat telah dicairkan dengan anggaran cukup besar. Dana transfer masih menjadi faktor dominan dalam pendanaan provinsi Jawa Barat baik dari TKDD atau dana transfer antar daerah. (www.jabar.inews.id,2022).

Data lain yang menguatkan latar belakang penelitian ini dari Jurnal Peneliti terdahulu yaitu penelitian yang dilaksanakan Claudia Salindeho Tahun 2016 Jurusan Akuntansi di Universitas Sam Ratulangi Manado dengan penelitian judulnya tentang Belanja Daerah yang dipengaruhi DAK serta DAU di Prov. Sulawesi Utara hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Belanja Daerah dipengaruhi dengan signifikan oleh DAU, sementara Belanja daerah tidak dipengaruhi dengan signifikan oleh DAK pada Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu secara simultan atau bersama-sama Belanja Daerah tidak dipengaruhi dengan signifikan oleh DAU dan DAK pada Provinsi Sulawesi Utara.

Dari hasil kesimpulan yang beragam mengenai DAU dan DAK yang mempengaruhi Belanja Daerah, menjadi ketertarikan peneliti untuk ditelaah lebih lanjut mengenai DAU dan DAK apakah mempunyai pengaruh yang signifikansi kepada Belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 Secara Parsial dan Simultan. Karena, Penulis kembali melaksanakan penelitian dengan Judul dan Subjek yang berbeda dengan Judul “ **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2020)**”

KAJIAN TEORITIS

Dalam Mengelola dan mengurus urusan pemerintahan daerah, pemerintah harus memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi disuatu daerahnya yang bukan dimotivasi oleh berbagai sasaran secara individual, namun lebih ditunjukkan dengan tujuan yang hasil utamanya yaitu bagi kebutuhan suatu daerah. Hal ini sesuai dengan teori *Grand Theory* dengan konsep *Stewardship theory*. Adapun pengertian *Stewardship theory* Menurut Putro (2013) adalah sebagai berikut :

“Teory *Stewardship* adalah konsep yang mendeskripsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik.”

Teori *Stewardship* menerangkan tentang keadaan manajemen yang tidak dimotivasi oleh sasaran secara individu, namun lebih diarahkan terhadap tujuan hasil penting demi keperluan organisasinya (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991 dalam Budiarti, E., 2017). Gambaran dari teori tersebut mengenai kuatnya kaitan antara keberhasilan dan kepuasan organisasi. Sementara menurut Etty Murwaningsih (2009) dalam Budiarti, E. (2017) teori *Stewardship* sesuai pandangan filosofi tentang sikap yang dimiliki manusia yaitu bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan juga manusia terintegrasi. Berdasarkan pengertian diatas maka pemerintahan perlu berupaya dengan optimal untuk melakukan pemerintahannya dalam memperoleh sasaran pemerintah yakni mensejahterakan masyarakat. Jika sasaran pemerintah bisa didapatkan, sehingga masyarakat yang menjadi pemilik dapat merasakan kepuasan terhadap kinerja perusahaan. Hubungan antara *stewardship* terkadang menimbulkan konflik antara pemerintah dengan rakyat. Umumnya pihak rakyat serta pemerintah mempunyai

perbedaan keperluan. Rakyat mengharapkan kesejahteraan rakyatnya terpenuhi dengan baik, sedangkan pemerintah mempunyai kecenderungan untuk daerahnya dan mengalokasikan keuangan daerahnya secara merata. Sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara rakyat dengan pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan tingkat pendapatan daerah agar kebutuhan rakyat maupun kebutuhan pemerintah sama-sama terpenuhi. Maka dari itu pengelolaan perlu dapat dilakukan pemerintah mengenai penghasilan, kekayaan, dan aktiva daerah demi kemakmuran masyarakat berdasarkan isi pada undang-undang 1945 pasal 33 yang mengatakan bahwasanya kekayaan alam seluruhnya dipegang oleh pemerintah perlu dimanfaatkan dan dipakai dalam menyejahterakan rakyat. Adapun sistem pemerintahan daerah yang terjadi saat ini dengan menggunakan sistem daerah otonom yang sesuai UU No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan kepada otonom dalam mengurus dan mengatur keperluan pemerintah pada sistem NKRI. Setiap daerah diberi suatu hal agar menyelenggarakan otonomi daerah dengan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembangunan daerah.

Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan Belanja Daerah

Pada UU No. 33 Tahun 2004 yang menjelaskan DAU yaitu dana yang sumbernya dari penghasilan APBD yang maksud diberikannya agar kemampuan keuangan setiap daerah terjadi pemerataan dalam memahami keperluan daerah untuk melaksanakan sentralisasi. Nabiyatun Nur Fatimah, dkk (2020) Meneliti Belanja Daerah yang diberikan pengaruh oleh Dana Perimbangan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan hasil penelitiannya disebutkan variabel Belanja Daerah diberikan pengaruh dengan signifikan oleh variabel DAU serta PAD. Sementara itu, Belanja Daerah dipengaruhi secara tidak signifikansi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) serta DAK. Maka banyak tidaknya suatu dana, baik itu DAK maupun DBH yang diterima tidak signifikansi pengaruhnya kepada suatu belanja daerah.

Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dengan Belanja Daerah

Pada UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DAK yaitu dana yang asalnya dari penghasilan APBN yang diberi ke beberapa pemerintah daerah (APBD) yang tujuan diberikannya bantuan dana pada aktivitas khusus seperti keperluan daerah yang prioritasnya secara nasional. Menurut (Nordian et al., 2009) yang menerangkan bahwasanya DAK yaitu dana yang tiap tahun ditentukan pada APBN agar diberikan ke pemerintah daerah berdasarkan kriterianya, yang bertujuan dalam memberikan bantuan dana aktivitas khusus keperluan daerah serta kegiatan daerah yang pemerintahan pusat berikan lebih tinggi (Ferdiansyah et al., 2018). DAK bertujuan dalam membuat biaya aktivitas khusus yang dibebankan dan perlu pemda tanggung berkurang. Irfan Ferdiansyah, dkk (2018). Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwasanya DAU maupun DAK yang pengaruhnya signifikansi, sementara Belanja Daerah tidak diberikan pengaruh secara signifikan oleh Dana Perimbangan serta PAD pada Kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.

Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

DAU yaitu dana asalnya dari APBN yang bertujuan diberikan untuk membuat kemampuan finansial daerah terjadi pemerataan dalam memberikan biaya untuk tugas daerah sebagai rangka melaksanakan desentralisasi. Pada setiap daerah, DAU ditetapkan dari tinggi kecilnya kesenjangan fiskal di daerah tersebut, yang menjadi pembeda pada kebutuhan fiskal dan potensi fiskal, DAU digunakan dalam membuat kesenjangan tertutup yang timbul dikarenakan potensi pendapatan daerah yang didapatkan kurang dari kebutuhan daerah. Banyaknya DAU secara menyeluruh ditentukan sedikitnya 26% dari penghasilan bersih negara yang ditentukan pada APBN.

DAK yaitu dana yang sumbernya dari penghasilan APBN yang diberikan ke beberapa daerah bertujuan dalam memberikan bantuan dana pada aktivitas khusus yang menjadi tugas daerah serta berdasarkan pada prioritasnya secara nasional, khususnya dalam memberikan dana kebutuhan fasilitas layanan dasar rakyat yang tidak sesuai standar dan untuk membantu mempercepat pembangunan daerah.

Marisa Apriyanti Wulandari, dkk (2021) meneliti Belanja Daerah yang diberikan pengaruh oleh DAK, DAU, dan PAD yang terjadi di Indonesia pada Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2018 hasil penelitiannya menyebutkan bahwa hasil yang dihasilkan memperlihatkan bahwasanya Belanja Daerah dipengaruhi secara signifikansi dan positif oleh PAD, sementara itu Belanja Daerah juga dipengaruhi secara signifikansi dan positif oleh DAK.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Pemaparan yang di sampaikan di kerangka pemikiran , Maka hipotesis awal yang di dapat adalah :

- H₁ : Belanja Daerah dipengaruhi secara positif oleh DAU
- H₂ : Belanja Daerah dipengaruhi secara positif oleh DAK
- H₃ : Belanja Daerah dipengaruhi secara positif oleh DAU dan DAK

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian kuantitatif, deskriptif, serta asosiatif dengan menggunakan hubungan kausal dengan tujuan dapat menggambarkan penelitian yang akan dilakukan secara sistematis serta agar dapat mengetahui sebab akibat. Data yang sudah diperoleh selama penelitian akan diolah dan di proses lebih lanjut berdasarkan teori yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian sehingga menghasilkan suatu jawaban kepada objek yang sementara ditelitinya.

Pada penelitian ini objeknya yakni Belanja Daerah, DAK, dan DAK. Sedangkan subjek penelitiannya yaitu kota/kab. di provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.

Tempat dan Waktu Penelitian

Dilakukannya penelitian ini pada kota/kab. di Jawa Barat pada tahun 2016-2020. Data Penelitian ini di ambil dari laporan APBD yang didapatkan dari website resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id/> . Bulan Oktober 2022 sampai selesai menjadi waktu dimulainya penelitian ini dilaksanakan. Pada penelitian ini populasinya berjumlah 9 kota serta 18 kabupaten pada pemerintah daerah kab./kota di Provinsi Jawa Barat sehingga populasi berukuran 27. Sementara itu, teknik sampling jenuh dipakai sebagai teknik dalam mengambil sampel pada penelitian ini.

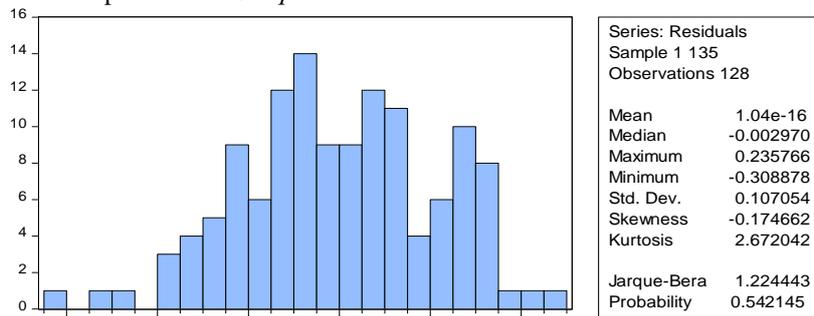
Dari data diatas sampel penelitian ini yaitu laporan APBD di 27 Pemerintah Kab./Kota di Provinsi Jawa Barat dengan tahun peninjauan sepanjang 5 tahun pada periode anggaran 2016-2020 sehingga sampling pada penelitian ini jumlahnya 135 Sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Normalis Data

Uji Normalis Data yang dipakai dalam melakukan pengujian mengenai apakah pada menelitian ini mempunyai distribusi normal atau tidak dengan memakai uji normalis data *Jarque-Berra*, hasil yang diperoleh biasa ditunjukkan pada nilai probabilitas *Jarque-Berra*.



Sumber: Hasil pengelolaan menggunakan evIEWS 10

Gambar 1 Hasil Uji Normalis

Dari Gambar diatas bisa dilihat bahwasanya Probabilitas *Jarque-Berra* mempunyai nilai berjumlah 0,542145, nilai tersebut berada di atas niali taraf nyata yang dipakai ($\alpha= 0,05$), jadi bisa diberikan kesimpulan bahwa data yang dipakai distribusinya normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan dalam melakukannya pengujian mengenai apa model regresinya memberi hasil yang mempunyai korelasi pada variabel independent, persamaan regresi memperlihatkan data, yaitu :

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.004341	47.71674	NA
X1	0.004171	45.49759	1.006462
X2	9.41E-05	2.109437	1.006462

Sumber: Hasil Pengelolaan Data EvIEWS 10

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwasanya korelasi antara DAU serta DAK berada di bawah 10, jadi bisa diberikan kesimpulan tidak ada gejala multikolinearitas pada variabel independennya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Herestoskedastisitas dilaksanakan dalam melakukan pengujian mengenai terjadinya perbedaan varians pada residual satu peninjauan ke peninjauan yang lain dalam model regresinya. Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan cara melakukan perbandingan pada angka probabilitas Obs R-squarenya serta tingkat signifikansi yang ditentukan ($\alpha= 0,05$)

Tabel 2 Hasil Uji heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	1.581301	Prob. F(2,125)	0.2098
Obs*R-squared	3.158589	Prob. Chi-Square(2)	0.2061
Scaled explained SS	3.147038	Prob. Chi-Square(2)	0.2073

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Eviews 10

Dari hasil pengujian Harvey Heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa nilai Obs*R-squared > 0,05 yakni berjumlah 0,2061, jadi bisa diberikan kesimpulan bahwasanya masalah herestoskedastisitas tidak terjadi pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini uji autokorelasinya memakai uji Serial Correlation LM Test, uji ini berarti bila dalam model nilai probabilitas Obs*R-squared bernilai di atas nilai tarif nyata ($\alpha= 0,05$) yang dipakai, jadi bisa diberikan kesimpulan bahwasanya model tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi, adapun kebalikannya bilai probabilitas obs*R-squared bernilai di bawah 0,05, jadi bisa diberikan kesimpulan bahwasanya gejala autokorelasi terjadi.

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.920397	Prob. F(2,118)	0.0578
Obs*R-squared	5.801140	Prob. Chi-Square(2)	0.0550

Sumber : Hasil Pengelolaan menggunakan eviews 10

Dari tabel diatas bisa diketahuinya bahwa probabilitasnya bernilai 0,0550 dan sama dengan taraf nyata yang dipakai yaitu berjumlah ($\alpha=0,05$), jadi bisa diberikan simpulan bahwasanya model penelitian ini gejala autokorelasinya tidak terjadi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda dipakai dalam melihatnya pengaruh DAU serta DAK terhadap Belanja Daerah di kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. Dari perhitungan program Eviews 10 dan hasilnya, yaitu:

Tabel 4 Hasil Estimasi Output
Dependent Variable: NLOGBELANJADAERAH
Method: Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.926054	0.065884	14.05580	0.0000
NLOGDAU	0.048910	0.064582	0.757328	0.4503
NLOGDAK	0.024494	0.009699	2.525515	0.0128
R-squared	0.050788	Mean dependent var	0.999531	
Adjusted R-squared	0.035601	S.D. dependent var	0.109881	
S.E. of regression	0.107907	Akaike info criterion	-1.591932	
Sum squared resid	1.455495	Schwarz criterion	-1.525088	
Log likelihood	104.8837	Hannan-Quinn criter.	-1.564773	
F-statistic	3.344099	Durbin-Watson stat	0.809906	
Prob(F-statistic)	0.038477			

Sumber : Hasil pengelolaan mrnggunakan eviews 10

Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas didapatkan hasil yang didapatkan dengan persamaan, yaitu :

$$\text{LOGY} = 0.926054 + 0.048910\text{DAU} + 0.024494\text{DAK}$$

Dari persamaan ini bisa diberikan penjelasan bahwa :

1. Konstanta berjumlah 0.926054 menyatakan bahwa tanpa variabel X_1 dan X_2 yang diasumsikan tetap/konstan atau tidak terdapat perubahan, sehingga belanja daerah sama dengan 0.926054%
2. Pada variabel DAU mempunyai koefisien regresi yang nilainya berjumlah 0.04891 yang mengartikan bila tidak terjadinya perubahan pada variabel independen yang lain, serta dana alokasi umumnya ditingkatkan 1%, sehingga Belanja Daerah akan naik sebanyak 0.04891%. Koefisien yang nilainya positif mengartikan adanya hubungan antara DAU dan belanja daerah. Bertambah besarnya DAU, menyebabkan tambah meningkat tingkat Belanja Daerah.
3. Pada variabel DAK mempunyai koefisien regresi yang nilainya berjumlah 0.024494 yang mengartikan bila tidak terjadinya perubahan pada variabel independen yang lain, dan DAK ditingkatkan 1% sehingga Belanja Daerah akan naik sebanyak 0.024494% koefisien yang nilainya positif mengartikan adanya hubungan positif pada DAK dan Belanja Daerah. Bertambah besarnya DAU, menyebabkan tambah meningkat tingkat Belanja Daerah.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F sebagai pengujian hipotesis yang memiliki tujuan dalam melihat tidak atau terdapatnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan. Uji hipotesisnya dilaksanakan melalui membandingkannya hasil F-Hitung dan F-tabelnya dengan tingkat signifikansi 0,05.

Adapun pada uji model regresi dalam uji f, yaitu:

- $H_0: \beta_1: \beta_2 \leq 0$ Yang berarti Belanja Daerah tidak dipengaruhi dengan positif oleh DAU dan DAK secara bersama-sama.
- $H_a: \beta_1: \beta_2 > 0$ Yang berarti Belanja Daerah dipengaruhi dengan positif oleh DAU dan DAK secara bersama-sama.

Yang demikian hasil hitung nilai statistik F pada model regresi yang dianalisis memakai software eviews 10 yaitu :

Tabel 5 Hasil Uji F

R-squared	0.050788	Mean dependent var	0.999531
Adjusted R-squared	0.035601	S.D. dependent var	0.109881
S.E. of regression	0.107907	Akaike info criterion	-1.591932
Sum squared resid	1.455495	Schwarz criterion	-1.525088
Log likelihood	104.8837	Hannan-Quinn criter.	-1.564773
F-statistic	3.344099	Durbin-Watson stat	0.809906
Prob(F-statistic)	0.038477		

Sumber : Hasil Pengelolaan menggunakan eviews 10

Pengujian model regresi memperoleh hasil yang memperlihatkan model regresinya berarti. Didapatkan F-hitung berjumlah 3.344099 yang signifikasinya bernilai 0.038477. Pada tingkat signifikan nilai F-tabel menggunakan 0,025 untuk $df=n-k-1$ ($df=135-3-1=131$) berjumlah 2,67, didapatkan f-hitung bernilai di atas f-tabel. Nilai yang didapatkan sesuai dengan nilai signifikan yang terlalu rendah menunjukkan bahwa tingkat kesalahan dalam pengambilan simpulan ditolaknya H_0 yang bernilai di bawah dari $\alpha=0,05$ (5%). F_{hitung} lebih tinggi dari F_{tabel} ($3.344099 > 2,67$) jadi ditolaknya H_0 .

Dari hasil analisis ini bisa diberikan kesimpulan bahwasanya secara simultan/bersama-sama Belanja Daerah dipengaruhi oleh DAU dan DAK.

Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)

Uji ini melihat pengaruh yang diberikan DAU dan DAK secara individu kepada Belanja Daerah, dilakukannya perhitungan bisa memakai uji t, hasil uji (ditolah/diterimanya H_0) ditentukan bisa dengan melakukan perbandingannya t hitung dan t tabel ataupun bisa pula dengan melihat nilai signifikannya. Nilai t tabel yang digunakan pada kesalahan 0,025 dengan $df= n-k-1$ ($df= 135-3-1=131$) yakni 1.97824. Dari hasil pengelolaan data dengan program *eviews 10* maka diperoleh hasil, yaitu:

Tabel 6 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.926054	0.065884	14.05580	0.0000
NLOGDAU	0.048910	0.064582	0.757328	0.4503
NLOGDAK	0.024494	0.009699	2.525515	0.0128

Sumber : Hasil Pengelolaan menggunakan eviews 10)

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Dalam mengetahui pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah, hipotesis yang dipakai, yaitu :

H₀₁: β₁ ≤ 0 Yang berarti Belanja Daerah tidak dipengaruhi secara positif oleh DAU.

H_{a1}: β₁ > 0 Yang berarti Belanja Daerah dipengaruhi secara positif oleh DAU.

Hasil hitung dari nilai t hitung bisa dilihat pada tabel diatas bagi variabel Dana Alokasi Umum (X₁) didapatkan berjumlah 0.757328 dengan signifikansi bernilai 0.4503 didapatkan t hitung bernilai di bawah t tabel (t_{hitung} = 0.757328 < t_{tabel}= 1.97824). Penentuan uji yaitu tidak ditolaknya H₀. Simpulan diatas juga dibuktikan dengan signifikasinya berada diatas 0.05 yang memperlihatkan secara individua DAU tidak mempengaruhi Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah

Dalam mengetahui pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah , hipotesis statistik yang dipakai yaitu :

H₀₂: β₂ ≤ 0 Yang berarti DAK tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

H_{a2}: β₂ > 0 Yang berarti DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Hasil dari perhitungan t hitung seperti dilihat pada tabel diatas untuk variabel DAK yang didapatkan berjumlah 2.525515 dan signifikansinya bernilai 0.0128 ada di bawah 0,05 yang memperlihatkan secara individual DAK memberikan pengaruh kepada belanja daerah.

Koefisien Korelasi

Digunakannya analisis korelasi dalam membahasnya tingkat hubungan DAU dan DAK dengan Belanja Daerah maupun dalam melihat seberapa kuatnya hubungan variabel DAU dan DAK dengan Belanja Daerah berdasarkan hasil pengelolaan program eviews 10, sehingga didapatkan hasil berikut..

Tabel 7 Hasil Koefisien Korelasi

Covariance Analysis: Ordinary
Balanced sample (listwise missing value deletion)

Correlation t-Statistic Probability	NLOG BELANJA DAERAH	NLOGDAU	NLOGDAK
NLOG BELANJA DAERAH	1.000000 ----- -----		
NLOGDAU	0.048516 0.545237 0.5866	1.000000 ----- -----	
NLOGDAK	0.215483 2.476978 0.0146	-0.080129 -0.902343 0.3686	1.000000 ----- -----

Sumber : Hasil Pengelolaan eviews 10

Dari hasil hitung diatas sehingga diperoleh nilai koefisien korelasi DAU dengan Belanja Daerah berjumlah 0.048516, berdasarkan interpretasi koefisien korelasi dari DAU memiliki hubungan sedang terhadap

Belanja Daerah. Sementara nilai koefisien DAK dengan Belanja Daerah mempunyai nilai berjumlah 0.215483, berdasarkan tabel diatas interprestasi koefisien korelasi dari DAK mempunyai hubungan dengan belanja daerah

Koefisien Determinasi

R-squared dipakai dalam melihat besarnya pengaruh yang diberikan DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah. Dari hasil olah data yang dikerjakan dengan program eviews 10, sehingga didapatkan hasil berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.050788
Adjusted R-squared	0.035601

Sumber : hasil pengelolaan eviews 10

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwasanya Adjusted R-squared berjumlah 0.035601 (3,56%) yang mengandung arti variansi Belanja Daerah (Y) bisa diterangkan oleh DAU dan DAK berjumlah 3,56%, sementara variabel diluar model menjelaskan sisanya yakni (100%-3,56%= 96,44%).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah meneliti Pengaruh dari DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat bisa diberikan kesimpulan :

1. DAU pada Kota/Kab. di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 terjadi fluktuasi dengan adanya kenaikan dan penurunan dalam realisasi Belanja Daerah.
2. DAK pada Kota/Kab. di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan adanya kenaikan dan penurunan dalam realisasi Belanja Daerah.
3. DAK dan DAK secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikansi terhadap Belanja Daerah sedangkan Secara Parsial DAU tidak berpengaruh positif dan tidak signifikansi terhadap Belanja Daerah. dan DAK secara Parsial Berpengaruh Positif dan Signifikansi terhadap Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.

Saran

Saran yang bisa diberikan peneliti sesuai dari hasil penelitian yang dilaksanakan bagi peneliti selanjutnya yaitu :

1. Untuk peneliti selanjutnya yang akan memilih penelitian tentang pengaruh DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah di harapkan dapat menggunakan variabel yang lebih bervariasi seperti perkembangan perekonomian serta berbagai faktor lainnya yang akan memberikan pengaruh pada Belanja Daerah.
2. Untuk pemerintah sebagaimana proposisi DAU dan DAK dengan baik sesuai yang sebenarnya dan mampu mengelola dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan Belanja Daerah agar lebih optimal kedepannya, dengan merealisasikan Belanja negara pada wujud mengadakan layanan umum sangat diperlukan masyarakat khususnya di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. 2017. Dana Alokasi Umum. Malang. UB Press.
- APBD Perubahan 2021 di Jawa Barat. (2021) diakses Pada 29 September 2021 dari <https://jabar.antaranews.com/>
- Awaniz, B. N. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), PAD Terhadap Belanja Daerah Jurnal Keuangan Daerah.
- Badric Siregar., 2017, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : UPP STIM.
- Budianto, Arif. (2022). Realisasi belanja Jawa Barat rendah Diakses Pada 28 Juli 2022 dari <https://jabar.inews.id/berita/realisasi-belanja-apbd-jabar-sangat-rendah-periode-januari-juni-baru-27-persen>
- Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*,16: 49-64.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- [Ghozali,I. \(2018\). Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro](#)
- Siagian, Pramela Augustina. 2009. “Flypaper effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”.Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara. Medan
- I., Ferdiansyah, Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap belanja daerah The influence of local revenue , general allocation funds , special allocation funds , and balancing funds on regional expenditure. 14(1), 44–52.*
- Ikhlas, Saily. 2011. Dana Alokasi Khusus dalam Pembiayaan Pembangunan
- Imam Ghozali. (2018). *Analisis Multivariat dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. d. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- H. Siswanto Sunarno, 2009 , *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iraningrum, T. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*
- Fernandes, Joni dan Lovita Fauzia .(2022). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada 19 kabupaten/kota di sumatera barat 2017-2020. 3(1), 187–197.*
- Nordiawan, Deddi, et al. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta Salemba Empat
- Nurmala Hasanah, Achmad Fauzi. 2016. Akuntansi Pemerintah Penerbit In Media.
- PP Nomor 12 tahun 2019 pasal 1, Tentang Dana Alokasi Khusus
- PP Nomor 55 tahun 2005, Tentang Dana Perimbangan

Permendagri No. 13 Tahun 2006, Tentang belanja daerah

Permendagri No. 21 Tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. Universitas Negeri Semarang.

R. Ernayani, (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013) Undang-Undang Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalima. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 1*(1).

Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara¹²³ Jurusan Akuntansi Fakultas Eko. *Jurnal EMBA, 4*(3), 705–716.

Sembiring, S. (2010). *Pemerintah Daerah (PEMDA)*. Bandung: Nuansa Aulia.

Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen, 5*(2), 183–194. <http://ejournal.lmiimedan.net>

Subekan, A. (2012). *Keuangan Daerah*. Malang: Dioma.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-25, Bandung: Alfabeta*

Wulandari, Nindito, M., & Gurendrawati, E. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2018*.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah kepada otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 Tentang Dana Alokasi Umum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Desentralisasi

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah.

Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi perundang-undanga